

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Transjakarta Operasikan Puluhan Bus Gandeng Buatan Cina

“Memang mereknya Cina, tapi komponen di dalamnya itu Eropa.”

Gangsar Parikesit

gangsar@tepo.co.id

JAKARTA – PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengoperasikan 21 bus gandeng milik Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD). Bus merek Zhongtong itu dioperasikan setelah PPD membayar denda keterlambatan pengadaan bus buatan Cina itu kepada Transjakarta.

Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas PT Transjakarta, Nadia Diposanjoyo, menuturkan perusahaan daerah itu mengoperasikan 21 bus gandeng milik PPD demi menjalankan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). “Keputusan BANI ini mengikat,” ujar dia kepada *Tempo*, kemarin.

Pada 2012–2013, Badan Layanan Umum Daerah Transportasi Jakarta (kini PT Transjakarta) mengadakan lelang pengadaan bus gandeng sebanyak 234 unit. Pada Oktober 2013, Perum PPD menjadi salah satu pemenang lelang pengadaan 59 bus gandeng yang akan dioperasikan di Koridor 1 (Blok M–Kota), dengan nilai kontrak mencapai Rp 701,2 miliar.

Sebelum bus pesanan PPD datang, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tja-

haja Purnama menolak penggunaan bus buatan Cina. Alasannya, bus buatan Cina banyak yang bermasalah. Pada pertengahan Februari 2014, misalnya, laporan soal kecacatan bus asal Cina bermunculan, dari berkarat sampai terbakar saat beroperasi.

Pada 28 November 2016, rombongan pertama 29 bus gandeng merek Zhongtong tiba. Sisanya, 30 unit, masuk Pelabuhan Tanjung Priok pada 20 Maret 2017—empat tahun setelah kontrak. Padahal, berdasarkan aden-dum kontrak pada 2015, 59 bus itu harus sudah beroperasi pada November 2016.

Transjakarta kemudian menuntut denda sebesar Rp 53,7 miliar atas keterlambatan pengadaan bus gandeng itu kepada PPD. Perusahaan negara itu keberatan dan mengajukan gugatan kepada BANI. Pada Juli 2018, BANI memutuskan denda yang harus dibayarkan sebesar Rp 26,8 miliar serta kontrak kerja sama antara PPD dan Transjakarta tetap berjalan.

Nadia menuturkan PPD baru membayar sebagian dari denda keterlambatan pengadaan bus itu. Adapun sisanya akan dicicil. “Sehingga belum seluruh unit (bus) dioperasikan,” ujar dia.

Bus Transjakarta merek Zhongtong jurusan Blok M–Kota di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat, 2014.

Nadia menjelaskan kontrak kerja sama pengoperasian bus gandeng milik PPD itu berlaku untuk tujuh tahun. Adapun tarif rupiah per kilometernya untuk satu bus sebesar Rp 21.295.

Nadia memastikan Transjakarta tidak mengambil keuntungan dari denda keterlambatan pengadaan bus yang dibayarkan oleh PPD. “Penetapan denda dan penalti ini diterbitkan mengingat potensi kerugian yang ditimbulkan akibat wanprestasi,” ujar dia.

Direktur Operasional PT Transjakarta, Prasetya Budi, menuturkan pengoperasian 59 bus gandeng asal Cina milik PPD itu akan dilakukan secara bertahap. Sejauh ini, baru 21 bus gandeng yang siap dioperasikan.

Prasetya mengklaim pengoperasian bus gandeng merek Zhongtong itu tidak melanggar hukum. Sebab, pengoperasian bus itu didasarkan pada putusan BANI. “Kalau sudah ada keputusan BANI kan artinya enggak melanggar hukum,” kata dia.

Direktur Utama Perum PPD Pande Putu Yasa

mengatakan perusahaan negara itu sudah membayar denda atas keterlambatan pengadaan bus kepada Transjakarta sebesar Rp 15 miliar. Adapun sisanya, Rp 11,8 miliar, akan dibayarkan setelah bus gandeng itu beroperasi dan menghasilkan pendapatan.

Pande menjelaskan, meski kontrak pengadaan bus itu disepakati pada 2013, bus yang didatangkan diproduksi pada 2015. Dia pun mengklaim bus-bus gandeng itu layak beroperasi. “Memang mereknya Cina, tapi komponen di dalamnya itu Eropa,” tutur dia. ●